

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abe, Alexander, 2005, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, Pembaruan, Yogyakarta.
- Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Media Sarana Press, Jakarta.
- Andi, Gadjong dan Salim, Agus, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia, Bogor.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi revisi: Cet. I, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Garner, Bryan A., 2004, *Black's Law Dictionary Eight Edition*, West Publishing Co., United States of America.
- Gie, The Liang, 1968, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid III, Gunung Agung, Jakarta.
- , 1977, *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-Undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Karya Kencana, Yogyakarta.
- Gunawan, Jamil, ed., 2005, *Desentralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta.
- Gulö, W., 2005, *Metodologi Penelitian*, Cet. Keempat, PT. Grasindo, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2012, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. Ke-8, Cet. Ke-21, UGM Press, Yogyakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Held, David, 2007, *Demokrasi dan Tatanan Global* (Terjemahan Damanhuri), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Huntington, Samuel P., and Joan M. Nelson, 1976, *No Easy Choice Political Participation in Developing Countries*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London.

-----, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkenbang*, diterjemahkan oleh Sehat Simamora, Rineka Cipta, Jakarta.

Ishak, 2010, *Posisi Politik Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah*, Penaku, Jakarta.

Jeddawi, Murtir, 2009, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Total Media, Yogyakarta.

Joeniarto, 1976, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Alumni, Bandung.

Kaho, Josef Riwu, 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM, Yogyakarta.

Karianga, Hendra, 2011, *Partisipasi Masyarakat Dalam pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Hukum dan Demokrasi*, PT Alumni, Bandung.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010, *Desain Besar Penataan Daerah (Desartada)*, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta.

Lembaga Administrasi Nasional, 2007, *Kajian Evaluasi Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Daerah*, Lembaga Administrasi Nasional, Jakarta.

Mahendra Putra Kurnia., et. al., 2007, *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, Total Media, Jakarta.

Manan, Bagir, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cet. Ke-3, Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, Yogyakarta.

- Malley, Michael, 2001, "Daerah, Sentralisasi dan Perlawanan" dalam Donald K. Emmerson (ed.), *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*, PT Gramedia, Jakarta.
- Mariun, 1975, *Azas-azas Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Marwan M., dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mulyadi, Mohammad, 2009, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, Nadi Pustaka, Tangerang.
- Nasroen, 1951, *Masalah Sekitar Otonomi*, J.B. Wolters, Groningen-Jakarta.
- Pandoyo, S. Toto, 1985, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-1, Liberty, Yogyakarta.
- Poerbopranoto, Koentjoro, 1987, *Sistim Pemerintahan Demokrasi*, PT. Eresco, Bandung.
- Prasojo, Eko, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguh Kurniawan, 2006, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok.
- Ratnawati, Tri, 2009, *Pemekaran Daerah; Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Saifuddin, 2009, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Siahaan, N.H.T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Siswadi, Edi, 2012, *Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Prima*, Mutiara Press, Bandung.

Soehino, 1985, *Hukum Tata Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum*, Liberty, Ed.Ke-1, Cet. Ke-1, Yogyakarta.

-----1996, *Ilmu Negara*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-4, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sunarno, Siswanto, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta.

Syaukani, Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid, 2005, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cet. Ke-4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Disertasi, Tesis, Skripsi, Jurnal dan Makalah:

Arnstein, Sherry. R, “A Ladder of Citizen Participation”, *AIP Jurnal*, Juli 1969.

Bustomi, Thomas. “Akankah Pemekaran Daerah Melahirkan Strong Government yang diikuti Prakarsa Otonomi Desa”, *Al Mizan* Edisi No. 139, April 2009, Universitas Pasundan, Bandung.

Hoessein, Bhenyamin, 1993, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah di Tingkat II Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara*, Disertasi, Program PPS-UI, Jakarta.

-----, 2002, “Perspektif Jangka Panjang Desentralisasi dan Otonomi Daerah”, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. I, No. 2, Bappenas, Jakarta.

Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang dan Risalah Sidang:

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, DPD-RI, Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2014, *Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, DPR-RI, tanggal 11 September 2014, Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, DPR-RI, tanggal 9 April 2012, Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Kemendagri, Jakarta.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *RUU Pemerintahan Daerah*, Kemenkumham, Jakarta.

Sekretariat Negara Indonesia, 1995, *Risalah sidang badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia*, Sekretarian Negara Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4036).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791).

Internet dan Surat Kabar:

AJDAOKE, “Dampak Pemekaran wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, <http://ajdaoke.wordpress.com/2012/03/10/dampak-pemekaran-wilayah-terhadap-kesejahteraan-masyarakat>, diakses pada 2 Desember 2014, pukul: 11.20 WIB.

“Aspirasi Pemekaran Mengalir Lagi, Kementerian masih godok PP”, <http://www.jpnn.com/read/2014/12/13/275262/Aspirasi-Pemekaran-Mengalir-Lagi,-Kemendagri-Masih-Godok-PP-#>, diakses pada 10 Januari 2015 pukul: 19.00 WIB.

Humaira, *Pembentukan Daerah*,
<http://4iral0tus.blogspot.com/2011/06/pembentukan-daerah.html>, diakses
pada 2 Desember 2014, pukul: 23.10 WIB.

Jonathan Reza Pahlawan, Ilmu wilayah,
<<http://jrezapahlawan.blogspot.com/2010/06/ilmu-wilayah.html>>,
diakses pada tanggal 18 Januari 2012, pkl: 13.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/masyarakat>, diakses pada 19
Maret 2015, pukul: 22.00 WIB

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Daerah Otonom (Provinsi,
Kabupaten, dan Kota) di Indonesia Per Desember 2014”,
http://www.otda.kemendagri.go.id/file/data2014/filekonten/jumlah_daerah_otonom_ri.pdf, diakses pada 9 Januari 2014, pukul: 22.00 WIB.

Susie Berinda, “Implementasi PP No. 78/2007: Memperlambat Laju Pemekaran Daerah”, *Kompas*, 16 Januari 2008.

www.otda.kemendagri.go.id, diakses pada 21 April 2015, pkl: 15.00 WIB.

www.kbbi.web.id/syarat, diakses pada tanggal 20 Mei 2015, pkl: 12.30.

www.kbbi.web.id/administrasi, diakses pada tanggal 20 Mei 2015, pkl:13.00